BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ukuran dan Tujuan (*Policy Standards And Objectives*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan khususnya ruang internet publik yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat diawali dari konsep bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk diimplementasikan.

Ukuran dari suatu kebijakan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penelitian suatu kebijakan dalam hal ini ruang internet publik, karena pada akhirnya tujuan kebijakan ruang internet publik adalah memberikan pelayanan internet gratis kepada masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Barat, sehingga ukuran dari kebijakan ruang internet tersebut di era globalisasi seperti ini haruslah disesuaikan dengan kondisi nyata dilapangan agar pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Konsep ukuran dari kebijakan ruang internet publik yang tidak tepat dapat berdampak negatif bagi kebijakan tersebut, dimana dalam proses berjalannya kebijakan ruang internet publik tersebut tidak sesuai dengan recana yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat dikarenakan kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat atau kebijakan tersebut membutuhkan strategi lain dalam penerapannya, sehingga konsep ukuran daripada kebijakan tersebut diterapkan adalah satu diantara proses penting agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.

Era globalisasi seperti ini penggunaan internet sudah sedemikian mudah dan murah didapatkan, penggunaannya dapat diakses melaui *handphone*, *tablet-PC*, dan modem. Bahkan, *provider-provider* telekomunikasi berlomba-lomba memberikan pelayanan murah dan mudah dalam penggunaan internet. Dan hal inilah satu diantara yang menjadi pertimbangan daripada ukuran kebijakan ruang internet dibentuk.

Faktor lain dari penerapan kebijakan ruang internet publik yang harus diperhatikan adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Suatu tujuan menjadi pedoman dan target bagi aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Karena tujuan yang baik jika tidak diiringi dengan kesungguhan aparatur dan juga dukungan masyarakat maka tujuan tersebut kemungkinan hanya akan menjadikan wacana saja dan tidak akan tercapai. Analoginya bahwa tujuan ruang internet publik pada dasarnya adalah memberikan layanan internet gratis bagi masyarakat Jawa Barat, namun pada pelaksanaanya banyak yang belum mengetahui dan merasakan ruang internet publik tersebut. Hal ini menunjukan bahwa tujuan daripada kebijakan ruang internet publik tersebut belum dapat tercapai seluruhnya.

Pemahaman lain dari konsep ukuran dan tujuan kebijakan ruang internet publik ini adalah adanya hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah pemikiran dan pengukuran yang matang mengenai keidealan kebijakan ini dengan kondisi sosio kultural, kondisi nyata kebijakan ini dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuannya adalah menyelaraskan konsep ukuran dan tujuan kebijakan ini agar secara sinergis memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan Peneliti

mendapatkan suatu pemahaman bahwa ukuran dari ruang internet publik adalah potensi masyarakat dalam penggunaan internet yang semakin meningkat sehingga Diskominfo membuat suatu kebijakan ruang internet publik adapun tujuannya adalah usaha yang dilakukan Diskominfo provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*.

Ukuran dan tujuan implementasi kebijakan ruang internet publik pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan Diskominfo provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat Jawa Barat berbasis internet yang dapat diakses secara gratis, dan hal inipun sejalan dengan visi Diskominfo Provinsi Jawa Barat, yaitu "terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien" dan merupakan satu diantara perwujudan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa kebijakan ruang internet publik ini merupakan kebijakan yang strategis jika dijalankan sesuai dengan konsep ukuran dan tujuan yang ada demi terwujudnya visi dan misi. Namun dalam perjalannya diperlukan aparatur yang profesional yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut, sehingga kebijakan ruang internet publik tersebut dapat berjalan secara optimal.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi (SDKI), beliau menuturkan bahwa:

> "Ukuran dan tujuan dari ruang internet publik ini adalah kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap internet sehingga perlunya memberikan fasilitas internet secara gratis sebagai salah satu tujuan mewujudkan masyarakat informasi"(8/5/2013).

Pendapat tersebut menjadikan pemahaman bagi peneliti bahwa ruang internet publik merupakan fasilitas pendukung dalam mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan internet yang semakin marak dan juga sebagai tujuan dalam mewujudkan masyarakat informasi.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan satu diantara aparatur Bidang Pengolahan Data Elektornik bagian pengolahan data, peneliti mendapatkan informasi bahwa: "ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah salah satu perwujudan dari pada Inpres No.3 Tahun 2003 sesuai dengan judul skripsi saudara"(15/5/2013). Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bagi peneliti bahwa implementasi kebijakan ruang internet publik pada dasarnya merupakan realisasi dari pada satu diantara poin yang ada dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 sebagai bentuk mengembangkan konsep *e-Government.*

Berdasarkan wawancara dengan petugas penjaga ruang internet publik didapatkan informasi bahwa: "menurut saya, kalo dilihat dari ukuran dan tujuan ruang internet publik ini, saya sangat mendukung, karena sedikitnya dapat membantu masyarakat yang ingin pakai internet gratis"(5/6/2013). Informasi tersebut memberikan gambaran bagi peneliti bahwa adanya komentar dan sikap yang positif terhadap kebijakan ruang internet publik ini, hal ini sedikit banyak akan memberikan dampak yang positif pula terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan satu diantara mahasiswa pengguna ruang internet publik, didapatkan informasi bahwa: "untuk era globaliasi seperti ini rasanya ukuran dan tujuan dari ruang internet

publik ini harus dievaluasi lagi walaupun terdengar menarik tapi rasanya kurang relevan dengan keadaan yang ada"(14/6/2013). Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa kebijakan ruang internet publik sebetulnya menjadi pelayanan publik yang menarik, dimana sebuah ruangan internet yang disediakan dan dapat digunakan secara gratis. Namun yang menjadi perhatian adalah ukuran lokasi yang jauh menjadi satu diantara kendala untuk menggunakan dan memanfaatkan kebijakan tersebut sehingga ketika ada fasilitas pribadi dalam mengakses internet melalui *handphone*, informan tersebut lebih memilih menggunakan *handphone* pribadinya. dibanding dengan datang ke ruang internet publik.

Hal lainnya dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang pernah menggunakan ruang internet publik di dapatkan informasi bahwa: "pendapat saya tentang ukuran dan tujuan ruang internet publik adalah perlunya evaluasi lebih lanjut walaupun tujuannya bagus, tapi saya rasa tidak tepat, karena jarak saya yang jauh untuk ke ruang internet publik"(16/6/2013). Pendapat tersebut menjadi suatu pemahaman bagi peneliti bahwa disamping komentar positif ada hal yang perlu di evaluasi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut agar benar-benar semua lapisan mendukung kebijakan tersebut. karena lokasi ruang internet publik tersebut dimana lokasi ruang internet publik terbilang tidak strategis dan jauh dari rumahnya. hal tersebut dapat menjadi satu diantara tujuan kebijakan tersebut tidak dapat tercapai.

Berdasarkan pemahaman peneliti bahwa Diskominfo Provinsi Jawa Barat sudah menunjukan usahanya dalam mematangkan konsep ukuran dan tujuan kebijakan ruang internet publik. dimana kebijakan ruang internet publik ini

merupakan kebijakan yang disediakan bagi masyarakat Jawa Barat untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi khususnya penggunaan internet dan juga satu diantara bentuk mewujudkan masyarakat informasi.

Uraian diatas tersebut menjadikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa ukuran dan tujuan kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari keidealannya dengan kondisi sosio kultural, realistis dengan kondisi perkembangan teknologi informasi sudah cukup baik walaupun dalam hal lainya diperlukan inovasi-inovasi pelayanan agar ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dapat terwujud secara menyeluruh.

4.1.1 Keidealan Kebijakan Ruang Internet Publik Dengan Kondisi Sosio Kultural (Sosial Budaya) Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat.

Suatu kebijakan pada dasarnya haruslah dilihat dari keidealannya dengan kondisi sosial, karena bagaimanapun juga berjalannya suatu kebijakan akan dirasakan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang memang merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena kondisi masyarakat disuatu daerah berbeda-beda budayanya sehingga membutuhkan kecermatan dan kecerdasan dari para pelaksana dan penyusun kebijakan agar kebijakan tersebut tidak hanya diterima disebagian masyarakat saja namun benar-benar diterima dan didukung masyarakat penuh.

Konsep ukuran dan tujuan kebijakan ruang internet publik sendiri pada akhirnya mengarah kepada keidealan kebijakan tersebut dengan kondisi sosio kultural yang ada di masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan data, bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan urutan pertama pengguna internet

terbanyak (www.tempo.com,12/12/2012). Data tersebut menjadikan pengetahuan bahwa kondisi sosio kultural atau kondisi sosial budaya masyarakat di Jawa Barat merupakan masyarakat dengan pengguna internet terbesar. Sehingga dengan data tersebut menjadikan kajian yang menarik bagi peneliti bahwa dengan mayoritas masyarakat Jawa Barat sebagi pengguna internet terbanyak, kebijakan ruang internet publik gratis tersebut pada dasarnya menjadikan pelayanan publik dan fasilitas menarik bagi masyarakat Jawa Barat yang ingin mengakses internet secara gratis. Dan dengan kebijakan tersebut pula, peneliti menilai bahwa hal ini dapat menjadi satu diantara jalan memajukan konsep *e-Government* dan menjadi tujuan akhir memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal.

Namun, dilain hal peneliti melihat ada masalah lain yang harus diperhatikan dimana jika melihat letak ruang internet publik tersebut yang berada di Diskominfo Provinsi Jawa Barat di Jl. Taman Sari No. 55 Bandung, peneliti berpendapat bahwa untuk masyarakat wilayah kota dan kabupaten Bandung bisa dikatakan jarak yang harus ditempuh untuk menggunakan ruang internet publik ini masih bisa dikatakan dekat dan masih terjangkau biayanya, namun lain halnya sekarang dengan masyarakat yang berada di Sukabumi, Cianjur, Bogor, kota-kota dan kabupaten lainnya yang berada di wilayah Jawa Barat secara realistis untuk menggunakan ruang internet publik tersebut sangatlah jauh dan dilihat dari segi biaya pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dengan fakta tersebut peneliti menduga secara sosial budaya pola pikir masyarakat lebih memilih menggunakan internet dengan *handphone* pribadinya dengan alasan lebih mudah. Hal inipun sekaligus menjadikan pemahanan bahwa belum meratanya kebijakan ruang internet publik tersebut dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.

Informasi mengenai masalah keidealan ruang internet publik ini, peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang SKDI, beliau memberikan pendapat bahwa: “menurut saya dengan perkembangan teknologi seperti ini, ruang internet publik ini, cukup ideal untuk diterapkan sebagai jawaban untuk melengkapi kebutuhan internet masyarakat”(8/5/2013). Pendapat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pada dasarnya ruang internet publik ini cukup ideal untuk diterapkan di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari aparatur pengolahan data bidang Pengolahan Data Elektronik, beliau memberikan pendapat bahwa: “menurut saya, jika melihat kondisi teknologi sekarang, ruang internet publik ini sangat ideal untuk dijalankan”.(16/5/2013). Pendapat tersebut merupakan sikap positif yang ditunjukan aparatur dalam mendukung diterapkannya kebijakan ruang internet publik.

Hal lain yang dapat peneliti ungkapan mengenai keidealan ruang internet publik ini adalah hasil wawancara dengan petugas penjaga ruang internet publik, beliau mengungkapkan bahwa: “menurut saya sih, ruang internet publik ini sangat ideal untuk diterapkan, apalagi inikan fasilitas internet gratis, bisa jadi pelayanan menarik bagi masyarakat”(5/6/2013). Pendapat tersebut dapat menjadi tambahan informasi bahwa adanya sikap positif terhadap penerapan kebijakan ruang internet publik.

Pendapat lainnya, peneliti dapatkan dari satu diantara pengunjung ruang internet publik, bahwa: “menurut saya sebetulnya ruang internet publik ini ideal saja jika diterapkan, tapi perlu sosialiasinya yang maksimal kepada masyarakat”

(14/6/2013). Pendapat tersebut menjadi perbandingan yang menarik bahwa pada dasarnya setuju ruangan internet publik tersebut diterapkan, namun perlunya sosialiasi dan promosi yang lebih agar masyarakat dapat merasakan secara menyeluruh.

Hal lainnya mengenai keidealan diterapkannya ruang internet publik, peneliti dapatkan dari pengunjung internet publik lainnya, bahwa: "saya kira ruang internet publik ini sudah tidak ideal diterapkan, karena internet sangat gampang dan murah digunakan, lewat hp pun bisa" (16/6/2013). Pendapat tersebut merupakan pandangan lain bahwa perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai diterapkannya ruang internet publik ini, karena bagaimanapun juga penggunaan internet saat ini sangat mudah dan murah didaptkan dan digunakan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kebijakan ruang internet publik ini dilihat dari keidealannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sudah cukup baik, namun perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar terjadi sinergisitas pemahaman.

4.1.2 Realistis (Kondisi Nyata) Kebijakan Ruang Internet Publik Dengan Perkembangan Teknologi Informasi

Fakta selanjutnya yang tidak lupa harus diperhatikan dari ukuran dan tujuan implementasi kebijakan ruang internet publik adalah kondisi nyata kebijakan tersebut dengan kondisi perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini berkembang pesat. Saat ini provider telekomunikasi dengan segala strategi pemasarannya memberikan harga murah, bonus dan paket menarik lainnya demi menarik pelanggan untuk menggunakan produknya. Hal ini berdampak pada

minat penggunaan internet yang semakin mudah dan murah digunakan, didukung pula dengan maraknya perusahaan penjual *software social media* yang semakin gencar mempromosikan produknya, yang secara langsung maupun tidak langsung hal ini akan mendongkrak kepada kenaikan pengguna internet. Kondisi inipun diikuti dengan semakin berkembang dan bersaing ketatnya perusahaan-perusahaan *smartphone,* Tablet *PC,* yang dengan cepatnya mengeluarkan ciptaan-ciptaan terbarunya, dengan harga bersaing dan terjangkau bagi semua kalangan baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal ini menjadikan fenomena yang menarik yang berkaitan secara langsung dengan kebijakan ruang internet publik tersebut, dimana di era globalisasi seperti ini masyarakat menginginkan hal yang memudahkan individunya didukung dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga kecenderungan sekarang ini, masyarakat Jawa Barat lebih memilih menggunakan *handphone* nya untuk mengakses internet dibandingkan harus datang ke ruang internet publik menggunakan internet dan mengeluarkan biaya ongkos angkutan umum atau kendaraan pribadi.

Fenomena-fenomena diatas menjadikan suatu ketertarikan sendiri bagi peneliti, dimana peneliti menduga bahwa pada dasarnya ruangan internet publik merupakan kebijakan yang disusun oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai tujuan untuk beradaptasi dan berpartisipasi terhadap kondisi nyata perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, sehingga Diskominfo sendiri sebagai dinas yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informatika, memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas yang berbasis teknologi informasi

dimana satu diantaranya yaitu internet yang diperuntukan secara gratis bagi masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SKDI didapatkan informasi bahwa: “menurut saya, ruangan internet publik ini sangat realistis diterapkan di era globalisasi, terlebih kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menjadi perhatian bagi Diskominfo”(8/5/2013). Pendapat tersebut menjadi pemahaman bagi peneliti bahwa pada dasarnya kebijakan ruang internet publik ini sangat realistis diterapkan apalagi dengan perkambangan teknologi sekarang ini menjadi celah pemanfaatan tersendiri.

Hal lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan aparatur pengolahan data bidang Pengolahan Data Elektronik, bahwa: “saya rasa kebijakan ruang internet publik ini realistis saja, karena memang dengan penggunaan yang semakin marak, kebijakan ini dapat menjadi pendukung bagi masyarakat”(16/5/2013). Pendapat ini menjadi gambaran bahwa adanya dukungan dalam penerapan kebijakan ini.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan petugas didalam ruang internet tersebut, bahwa: “kalo ditanya realistisnya, internet publik ini memang harus diterapkan, karena bisa jadi fasilitas menarik bagi masyarakat”(5/6/2013). Hal tersebut menjadi tambahan informasi bahwa dilihat dari aparaturnya kebijakan ini mendapatkan respon yang lumayan baik dalam penerapannya.

Pendapat lain peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengguna ruang internet publik, didapatkan informasi bahwa: “secara realistis ruang internet publik ini memang menarik, namun kurangnya sosialisasi menjadi perhatian lebih

lanjut”(14/6/2013). Pendapat ini menjadi perhatian bahwa pada dasarnya kebijakan ini menjadi kebijakan menarik, namun karena kurangnya sosialisasi menjadikan respon yang negatif dari masyarakat.

Pendapat lainnya peneliti dapatkan dari wawancara dengan pengunjung internet publik lainnya bahwa: “secara realita internet publik ini bagus, tapi perlu promosi kepada masyarakat, agar dapat digunakan secara masal”(16/6/2013). Pendapat tersebut menjadi perhatian lebih lanjut bahwa perlunya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, agar penggunaan internet publik tersebut dapat dirasakan secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang sudah peneliti sampaikan, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam hal realistis atau melihat (kondisi nyata) terhadap perkembangan teknologi informasi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik sudah menujukan usaha yang cukup baik.

4.2 Sumber Daya (*Resources*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan satu diantaranya didukung oleh adanya sumber daya-sumber daya pendukung, sumber daya yang tersedia akan menjadi dampak positif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumber daya tersebut berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Begitupun sebaliknya sumber daya yang tersedia akan menjadi dampak yang negatif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumber daya-sumber daya yang ada tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak di manfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Proses implementasi kebijakan ruang internet publik pada dasarnya dalam pelaksanaanya akan berhasil manakala sumber daya-sumber daya yang ada berjalan konsisten sesuai tujuannya, karena dalam kondisi nyatanya kebijakan ruang internet publik tersebut satu diantaranya sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang ada, aparatur yang bertanggung jawab akan memberikan dampak positif yang baik terhadap kebijakan tersebut, istilah bertanggung jawab pun bisa diinterpretasikan kedalam berbagai pengertian misalnya datang tepat waktu, menjunjung tinggi etika, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan hal-hal lainya yang akhirnya adalah mencapai tujuan dari kebijakan ruang internet publik tersebut.

Sumber daya lain yang sangat berpengaruh sebagai pendukung berjalannya suatu kebijakan adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu, karena bagaimana pun juga sumber daya manusia yang sudah profesional sedangkan sumber daya finansialnya tidak tersedia, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan yang rumit dalam merealisasikan kebijakan ruang internet publik secara optimal. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusianya sudah berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab, sumber daya finansial telah tersedia dengan cukup dan memadai, namun sumber daya waktu yang berbenturan dengan kebijakan lain dan persoalan-persoalan lainya, maka hal tersebut dapat menjadai salah satu penghalang dari tercapainya tujuan kebijakan ruang internet publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi bahwa:

> “Sumber daya-sumber daya terkait baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu sudah cukup terarah berjalan dengan

> baik, tinggal mewujudkan konsistensi dan optimalisasi terhadap pencapaian tujuan" (8/5/2013).

Pemaparan tersebut menjadi suatu gambaran bahwa pada dasarnya sumber daya-sumber daya yang ada sudah cukup memadai, hanya tinggal bagaimana konsisten dan optimalisasi itu tidak hanya terjaga dalam waktu yang singkat saja, namun terwujud dan terlaksana hingga benar-benar tujuan kebijakan ruang internet publik tersebut tercapai.

Hasil wawancara lainnya peneliti tujukan kepada aparatur pengolahan data Bidang Pengolahan Data Elektronik, beliau mengungkapkan bahwa: "menurut saya sumber daya yang ada dalam ruang internet publik sudah cukup baik, hanya tinggal menjaga kerjasama dan konsistensi dalam pelaksanaanya"(16/5/2013). Pendapat tersebut menunjukan bahwa sumber daya-sumber daya yang ada dalam ruang internet publik sudah cukup baik, namun perlu dievaluasi secara berkala agar konsistensi dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan petugas di ruang internet publik, bahwa: "menurut saya, mengenai sumber daya yang ada di ruang internet publik sudah baik, tapi memang perlu ditambahkan lagi seperti adanya printer"(5/6/2013). Pendapat tersebut menjadi perhatian bahwa adanya tanggapan positif terhadap sumber daya-sumber daya yang ada, namun perlunya penambahan fasilitas secara sumber daya finansial yang ada.

Hal lainnya yang dapat peneliti uraikan adalah hasil wawancara dengan pengguna ruang internet publik, bahwa: "pendapat saya tentang sumber daya-sumber daya yang ada dalam ruang internet publik cukup baik, tapi kalo bisa jam operasionalnya ditambah, dan juga adanya fasilitas tambahan seperti *printer*"(14/6/2013). Hal ini menjadi perhatian bahwa adanya harapan tentang

tambahan fasilitas yang ada terkait ruang internet publik ini agar lebih menarik lagi dalam proses pelayanannya.

Pendapat lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengunjung ruang internet publik yang lainnya, bahwa: “pengalaman saya waktu mengunjungi ruang internet publik cukup baik dilihat dari petugasnya, tapi saya merasa jam operasionalnya terbilang terlalu sebentar”(16/6/2013). Pendapat ini dapat menjadi perhatian lebih lanjut dalam penambahan jam operasional ruang internet publik agar dapat melayani publik lebih optimal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sumber daya terkait kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa barat yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik. namun perlunya tambahan fasilitas dan jam opersional dapat menjadi perhatian lebih lanjut dalam evaluasi kebijakan ini.

4.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang profesiaonal akan memudahkan jalan tercapainya tujuan kebijakan. Berdasarkan keahlian dan tanggung jawab yang dimilikinya sumber daya manusia/aparatur yang profesional akan memberikan seluruh pemikiran, tenaga dan keahliannya dalam melayani publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang sedang dijalankan. Begitupun sebaliknya ketika suatu kebijakan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang tidak profesional, maka hal tersebut akan menjadi hambatan

bagi tercapainya tujuan yang telah direncakan. Sehingga munculnya persepsi negatif dari masyarakat karena pelayanan publik yang diberikan tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, yang berakibat pada kurang mendukungnya masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pemaparan tersebut menjadikan pemahaman ketika kita analogikan kepada kebijakan ruang internet publik, karena pada dasarnya kebijakan ruang internet publik akan berhasil dan mencapai tujuannya ketika dijalankan oleh sumber daya aparatur yang memang profesional pada bidangnya masing-masing.

Kebijakan ruang internet publik merupakan suatu kebijakan yang memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet, sehingga dalam proses berjalannya pun dibutuhkan sumber daya aparatur yang memang mengenal dan bisa mengoperasikan internet dengan baik dan benar. Hal tersebut dimaksudkan masyarakat pengguna internet publik dapat diberikan pemahaman mengenai penggunaan internet yang baik dan benar dari pengetahuan aparatur yang dimilikinya agar kebijakan tersebut memang benar-benar diarahkan untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Lain halnya ketika kebijakan ruang internet publik tersebut dijalankan oleh sumber daya aparatur yang tidak profesional bahkan tidak mengenal penggunaan internet sama sekali, dampak yang diberikannya dapat berakibat negatif dimana para pengguna ruang internet publik tidak diarahkan kepada penggunaan internet yang sehat dan baik sehingga memunculkan keadaan dimana pengguna internet publik tersebut dapat dengan bebas mengakses berbagai situs di internet tanpa batas.

Berdasarkan golongannya Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) didominasi oleh 44% aparatur berpendidikan S1 seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bab 3. Bidang lain sebagai pengelola ruang internet publik ini adalah Bidang Pengolahan Data Elektronik dimana bidang ini didominasi oleh 49% aparatur berpendidikan S1. Penjelasan ini menjadikan gambaran bagi Peneliti bahwa dengan sumber daya aparatur yang mayoritas berpendidikan S1, seharusnya dapat membentuk bagi terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional yang dapat menjalankan kebijakan ruang internet publik ini sesuai tujuan yang direncanakan walau disisi lain kadang kala tingkat pendidikan tidak dapat menjadi ukuran kualitas kinerja seorang aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi bahwa sumber daya aparatur dalam kebijakan ruang internet publik "sudah cukup profesional dan berusaha keras dalam menjalankan kebijakan tersebut demi tercapainya tujuan walaupun dalam beberapa aspek tertentu banyak yang harus diperbaiki" (8/5/2013).

Pemaparan tersebut dapat terlihat dilapangan dari usaha aparatur Diskominfo yang ditunjukan dengan cukup ramahnya ketika individu datang ke kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat dengan tidak segan-segan memberikan informasi, baik seputar ruangan internet publik maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainya yaitu dengan pengunjung ruang internet publik mengungkapkan bahwa:

> "Pada dasarnya ketika datang ke ruangan internet publik tersebut saya merasa dilayani dengan baik, dimana aparatur yang bertugas didalam ruang internet publik tidak segan-segan memberikan informasi kepada saya. Sehingga saya tidak merasa segan ataupun malu ketika berada diruangan

> tersebut, namun yang menjadi perhatian adalah tidak adanya pengarahan dari aparatur yang bertugas di ruang internet publik tersebut, sehingga pada awalnya saya merasa kebingungan ketika mau menggunakan internet tersebut" (15/6/2013).

Hasil wawancara tersebut menjadikan gambaran bagi peneliti bahwa ada usaha yang dilakukan aparatur terkait ruang internet publik sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, walau ada hal-hal yang harus dibenahi seperti menjaga konsistensi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang ada demi terwujudnya tujuan secara optimal dan dapat dirasakan masyarakat secara sepenuhnya.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengguna ruang internet publik lainnya bahwa: "pendapat saya tentang sumber daya aparatur yang ada diruang internet publik cukup baik, dan saya merasa cukup dilayani dengan baik"(16/6/2013). Pendapat tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa adanya komentar positif dari pengguna ruang internet publik dalam menanggapi sumber daya aparatur terkait, hal ini dapat menjadi dampak positif baagi pelaksanaan ruang internet publik ini.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia terkait implementasi kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat sudah berjalan cukup baik.

4.2.2 Sumber Daya Finansial dalam ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Proses berjalannya suatu kebijakan tidak terlepas dari sumber daya finansial atau keuangan yang digunakan, sumber daya finansial/keuangan sangat berpotensi besar sebagai pendukung sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

ruang internet publik sesuai tujuan. Sumber daya manusia/aparatur yang memadai dan profesional tidak akan dapat merealisasikan kebijakan tersebut secara optimal manakala tidak didukung secara sumber daya finansial yang mencukupi. Begitupun sebaliknya, ketika sumber daya finansial/keuangan mencukupi dan memadai untuk menjalankan suatu kebijakan manakala tidak didukung oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab akan menjadi hambatan bagi tercapainya suatu tujuan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa antara sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat sangat berkaitan erat satu sama lain. Ketika sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya berjalan secara sinergis satu sama lain, maka bukanlah suatu asa semata tujuan ruang internet publik sebagai sarana gratis yang diberikan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat untuk mengakses internet dalam berjalan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh keseluruhan masyarakat yang berada di Jawa Barat.

Pemaparan diatas bisa menjadi suatu fakta sebaliknya jika sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam kebijakan ruang internet publik tersebut berjalan timpang dan tidak terjadi kerjasama satu sama lain, karena bagaimanapun kucuran dana yang diberikan ketika tidak dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab maka hal tersebut akan menjadi hambatan pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika sumber daya manusianya memadai untuk melaksanakan kebijakan ruangan internet publik tersebut namun sumber daya finansial nya tidak mencukupi, maka hal tersebut itupun dapat menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan.

Sumber daya finansial yang tersedia diwujudkan dengan disediakannya fasilitas-fasilitas pendukung ruang internet publik tersebut. Melalui sumber daya finansial yang memadai, hal tersebut menjadi dampak yang positif terhadap penyediaan sarana-sarana yang ada karena mampu menyediakan fasilitas yang mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Hal inipun dapat menjadikan persepsi yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat di Jawa Barat karena dengan fasilitas yang menarik, dapat menjadi ketertarikan sendiri untuk menggunakan ruangan internet tersebut.

Berdasarkan fakta dilapangan seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab 3, alokasi sumber daya finansial yang tersedia di realisasikan dengan adanya fasilitas 8 komputer yang sudah terhubung internet, serta adanya perpustakaan. Sehingga selain pengunjung ruang internet publik menggunakan fasilitas internet gratis, dapat pula membaca buku, koran dan majalah. Meskipun saat ini buku-buku yang disediakan perpustakaan di dalam ruang internet publik tersebut masih terbatas hanya seputar perkembangan teknologi informasi, buku-buku sejarah Provinsi Jawa Barat, koran-koran seputar Jawa barat dan informasi teknologi, dan laporan-laporan kerja Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan satu diantara pengunjung ruang internet publik mengumukakan bahwa:

> "Sumber daya finansial yang ditunjukan dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang ada diruang internet publik tersebut dapat saya katakan sudah memadai, hanya saya mengharapkan ada penambahan fasilitas-fasilitas lainya seperti fotocopy, printer, dan dilengkapi buku-buku lainnya. Agar menjadi lebih menarik minat masyarakat, serta jika dapat direalisasikan ruang internet publik tersebut tidak hanya di Diskominfo saja, namun terdapat di semua daerah di Jawa Barat". (14/6/2013)

Pendapat dari informan tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan dan perwakilan harapan dari satu diantara masyarakat Jawa Barat, bahwa dengan penambahan fasilitas-fasilitas lainnya dapat menjadi dampak positif yaitu lebih menarik lagi minat masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat untuk mengunjungi dan menggunakan ruang internet publik tersebut, dan juga adanya harapan bahwa ruang internet publik tersebut tidak hanya berada di Diskominfo Provinsi Jawa Barat saja namun ada di semua daerah Jawa Barat, sehingga daerah terpencil di Jawa Barat sekalipun dapat meikmati ruang internet publik tersebut.

Hasil Penelitian lainnya yang peneliti dapatkan mengenai sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan ruang internet publik adalah mengenai dana yang sudah dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan untuk tahun 2011 termasuk didalamnya penyelenggaraan internet publik sebesar Rp.26.536.502.534,41 dan selama periode tersebut realisasi anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebesar Rp.22.908.478.179,00 dalam kata lain pada tahun 2011 realiasasi anggaran yang sudah dialokasikan mencapai 86,33%". (Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Diskominfo Provinsi Jawa Barat)

Laporan tersebut menjadi gambaran bahwa Diskominfo Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah berusaha seoptimal mungkin untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang sudan direncanakan dengan dana yang sudah tersedia. Dibuktikan dengan sudah 86,33% pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari semua kegiatan yang telah direncanakan, walaupun hal ini harus menjadi dasar

pertimbangan tahun-tahun setelahnya agar dapat menjalankan kebijakan-kebijakan lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan, maka dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya finansial terkait implementasi kebijakan ruang internet publik sudah cukup baik.

4.2.3 Sumber Daya Waktu Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Suatu kebijakan dalam proses perencanaanya pada dasarnya sudah ditentukan waktu pelaksanaanya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada agar konsisten dan mempunyai target dalam menjalankan tanggung jawabnya dan juga menjadi perhatian agar menjadi target dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Secara hukum alam waktu tidak dapat diatur dan diberhentikan sesuai keinginan manusia, karena waktu akan terus berjalan tanpa bisa dihalang-halangi bagaimanapun kuatnya seorang manusia. Fakta inipun berlaku bagi berlangsungnya suatu kebijakan dimana ketika suatu kebijakan dibentuk dan sudah ditentukan kapan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, maka sumber daya-sumber daya yang ada baik sumber daya aparatur maupun sumber daya finansialnya harus betul-betul menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing agar terjadi keseimbangan bekerja sehingga tidak menyalahi waktu yang sudah ditentukan.

Sinergisitas sumber daya-sumber daya yang ada dalam kebijakan ruang internet publik dapat dikatakan berjalan baik satu diantaranya dengan menghargai waktu yang ada, bagaimanapun cakapnya sumber daya aparatur dalam kebijakan ruang internet publik bekerja, jika bekerja tidak tepat waktu maka hal tersebut dapat menjadi hambatan pencapaian dari kebijakan tersebut. Begitupun dengan pemanfaatan sumber daya finansial yang ada, jika sumber daya finansial dalam kebijakan ruang internet publik ini tidak digunakan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan terjadi keterlambatan dalam penggunaanya, maka hal inipun dapat menjadi penghambat keberhasilan ruang internet publik.

Walaupun terkadang masalah waktu ini terlihat seperti sederhana namun kadangkala jika tidak manfaatkan dan digunakan secara baik akan menjadi hal yang dapat mensukseskan bahkan menjadi penghambat suatu kebijakan. Kebijakan ruang internet publik sendiri jika dilihat dalam proses berjalannya merupakan suatu kebijakan berbasis teknologi informasi yaitu internet seperti yang sudah peneliti sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dalam waktu sekarang ini kebijakan ini bisa dikatakan tepat karena dengan semakin banyaknya pengguna internet khususnya di Jawa Barat, kebijakan ruang internet publik dapat menjadi satu diantara kebijakan yang berorientasi dalam membentuk masyarakat informasi, namun lain halnya jika kita membayangkan 2 atau 5 tahun kedepan, jika kebijakan ruang internet publik tidak segera mendapatkan evaluasi dan menciptakan inovasi-inovasi, maka kebijakan ruang internet publik ini bisa-bisa tidak dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya. Berdasarkan penglihatan dan pemahaman Peneliti, sekitar tahun 2011 ramai diberbagai daerah bahkan peneliti melihat didaerah peneliti sendiri, masyarakat

membuka usaha warung internet "warnet" karena profit yang dihasilkannya lumayan besar seiring dengan meningkatnya pengguna internet. Namun pada waktu-waktu setelahnya ketika banyaknya *provider-provider* telekomunikasi menyediakan fasilitas menarik dan murah bahkan gratis dalam penggunaan internet dan diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam menciptakan telepong genggam *"handphone"* dengan harga relatif murah , sedikitnya masyarakat sedikit beralih untuk menggunakan *handphone*nya dibanding harus datang ke warnet.

Fenomena-fenomena yang sudah diuraikan diatas menjadikan perbandingan bagi kebijakan ruang internet tersebut, dimana jika tidak segera di evaluasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam proses berjalannya kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut akan tertinggal dengan waktu yang terus berjalan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat.

Kebijakan ruang internet publik ini dilihat dari sumber daya waktunya mulai berjalan pada tahun 2010 dan jam operasionalnya dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu diantara mahasiswa pengunjung ruang internet publik mengungkapkan bahwa:

> "Sumber daya waktu yang disediakan saat ini kalau bisa jam operasionalnya tidak hanya sampai jam 3 saja, tapi ditambah mungkin sampai jam 6 sore, karena jika hanya sampai jam 3, bisa dibilang cukup singkat dan juga rata-rata kegiatan saya melebihi jam 3 sore, sehingga jika saya sekali-kali berniat datang kesana takut sudah tutup" (14/6/2013).

Ungkapan dari pengunjung tersebut menjadi masukan sekaligus pengharapan adanya waktu tambahan operasionalnya, dimana tidak hanya pada sampai pukul 3 sore saja, mungkin ditambah sampai pukul 6 sore, hal ini

dikarenakan terasa pendeknya waktu yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi perhatian yang sangat penting demi keberlangsungan ruang internet publik dan memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat Jawa Barat, sehingga bagi masyarakat yang ada di luar kota atau kabupaten Bandung jika sesekali datang ke ruang internet publik dapat menikmati fasilitas tersebut karena jam operasional yang diberikan lumayan panjang.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dimana harapan tersebut dapat menjadi perhatian khususnya berhubungan dengan sumber daya yang ada dalam kebijakan ruang internet publik tersebut. Digambarkan bahwa jika adanya tambahan jam operasional ruang internet publik tersebut yang awalnya berjalan dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB, ditambah 3 jam sampai pukul 18.00 WIB, hal tersebut diperlukan sumber daya aparatur atau staf khusus yang mau dan mampu diberikan tugas tambahan untuk lebih lama menjaga ruang internet publik tersebut dari biasanya karena adanya tambahan jam operasional. Hal ini dapat berhubungan dengan adanya tambahan penghasilan bagi aparatur tersebut karena mau tidak mau sudah menggunakan jasa dan tenaga aparatur tersebut.

Hal inipun menjadi perhatian pula bagi masyarakat, karena jika inovasi-inovasi pelayanan yang ditunjukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam kebijakan ruang internet publik tidak didukung secara penuh, atau dalam artian lain tidak adanya sinergisitas antara aparatur dengan masyarakat, maka harapan dan inovasi-inovasi pelayanan tersebut akan menjadi negatif. Dan akhirnya, tenaga, biaya dan elemen-elemen lain dari ruang internet publik tersebut akan menjadi percuma. Karena bagaimanapun matangnya konsep suatu kebijakan jika tidak adanya kesefahaman antara aparatur dengan masyarakat maka hal tersebut

akan menjadi dampak yang negatif bagi tercapainya suatu kebijakan khususnya implementasi kebijakan ruang internet publik.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengunjung internet lainnya bahwa "kalau bisa ada waktu khusus dimana diadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan internet, biar lebih menarik lagi"(16/6/2013).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti mendapatkan suatu pemahaman bahwa usaha-usaha yang ditunjukan aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan sumber daya waktu terkait dengan implementasi kebijakan ruang internet publik dapat dikatakan cukup baik.

4.3 Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana (*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Proses berjalannya suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pola komunikasi yang dijalankannya. Karena pola komunikasi yang dijalankan baik oleh aparatur dalam suatu kebijakan akan berdampak positif terhadap kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika pola komunikasi yang dijalankan oleh aparatur dalam suatu kebijakan berjalan buruk makan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kebijakan tersebut dimana hal buruknya adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut.

Uraian diatas tersebut menjadi suatu gambaran bahwa dalam berjalannya kebijakan ruang internet publik diperlukan adanya suatu pola komunikasi yang baik agar terjadinya proses penyampaian informasi yang baik antara aparatur

dengan masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak terjadi *"miss communication"* atau salah faham dalam kebijakan ruang internet publik tersebut. Kebijakan ruang internet publik dapat diterima dan dijalankan dengan baik jika pola komunikasi yang dijalankannya baik pula sehingga masyarakat dapat mengerti dan faham betul kepada kebijakan tersebut dan tidak ragu untuk mendukung kebijakan ruang internet publik tersebut. Lain halnya jika masyarakat merasakan pola kumunikasi yang dijalankan dalam kebijakan ini berjalan buruk maka masyarakat pun tidak dapat menerima dan faham, yang berakibat kepada tidak adanya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan ruang internet publik ini.

Tujuan dari kebijakan ruang internet publik ini pertama-tama akan tercapai ketika komunikasi yang menyangkut aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga aparatur penyelenggara ruang internet publik sebagai pemangku tanggung jawab kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan ruang internet publik, sehingga proses komunikasi yang dijalankanya haruslah berjalan baik, dimana terjadinya kesefahaman antar aparatur yang satu dengan yang lainnya terhadap kebijakan ruang internet publik. Lain hal nya ketika proses komunikasi antar aparaturnya sendiri berjalan tidak baik hal ini akan berakibat buruk atau terjadinya salah faham antar aparatur penyelenggara terhadap kebijakan ruang internet publik, merugikan banyak pihak dan akibat terburuknya adalah kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal dan jauh dari tujuannya.

Komunikasi yang berjalan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas para penyelenggara atau aparatur dalam kebijakan ruang internet publik. Karena melalui komunikasi yang baik, aktivitas para

penyelenggara akan tersusun dan terarah sesuai instruksi dari pimpinan yang selanjutnya diterapkan kepada kebijakan tersebut. Aktivitas aparatur dalam kebijakan ruang internet publik ini pun menjadi cerminan bagi kebijakan tersebut, karena ketika aktivitas aparatur dalam kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan baik. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas aparaturnya berjalan buruk maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan buruk pula.

Aktivitas aparatur ini pun menjadi perhatian lebih bagi suatu instansi pemerintahan, karena bagaimanapun juga menyatukan suatu kesefahaman dalam menerapkan suatu kebijakan membutuhkan tenaga yang lebih dalam perwujudannya. Dengan pola pikir yang semakin dinamis tidak jarang banyaknya kesalahfahaman yang terjadi karena satu dan lain hal yang mengakibatkan terhambatnya kebijakan tersebut, hal ini dapat berupa mundurnya waktu pelaksanaan, aparatur yang tidak bertanggung jawab, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya yang akan menggangu tercapainya tujuan kebijakan ruang internet publik.

Uraian diatas tersebut dapat dijadikan suatu perhatian bagi instansi pemerintahan, dimana dalam suatu kebijakan diperlukan adanya pola komunikasi yang baik dari aparatur penyelenggara agar melahirkan pola aktivitas aparatur yang baik dalam kebijakan ruang internet publik. Karena pada akhirnya pola seperti ini dapat menjadi suatu pemanfaatan secara maksimal bagi sumber daya-sumber daya yang ada baik itu sumber daya aparatur, sumber daya finansial dan sumber daya waktu yang selanjutnya tidak hanyaditerapkan dalam ruang internet publik saja, namun diterapkan pula dalam kebijakan-kebijakan lainnya.

Proses komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan ruang internet publik pada dasarnya dapat dilihat pula dalam hal koordinasi didalamnya, karena bagaimanapun juga dalam proses komunikasi, koordinasi akan berperan penting sebagai jembatan tercapainya tujuan kebijakan. melalui koordinasi, peran dan fungsi komunikasi akan berjalan lebih terarah dan sesuai aturan, melalui koordinasi pula hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan akan lebih terjalin dengan baik, bahkan pada akhirnya ketika koordinasi dalam kebijakan ruang internet publik berjalan dengan baik yang selanjutnya diterapkan pula kepada masyarakat maka kebijakan ruang internet publik ini aka berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana adalah proses tranmisi didalamnya, karena komunikasi pada dasarnya tidak hanya sekedar penyampaian informasi namun memerlukan proses komunikasi yang baik pula didalamnya, agar informasi-informasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik dan menimbulkan salah pengertian oleh masyarakat, sehingga masyarakatpun tidak bingung dalam menggunakan kebijakan ruang internet publik tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik adalah konsistensi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketegasan terhadap informasi-informasi yang akan diterapkan baik bagi aparatur penyelenggara kebijakan ruang internet publik maupun masyarakat yang akan menggunakan kebijakan tersebut. Tanpa konsistensi dari pada penyampaian informasi tersebut maka masyarakat sendiri pun tidak akan secara penuh mendukung kebijakan tersebut karena tidak adanya

kejelasan tujuan yang menyebabkan kurang respon nnya masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan tersebut.

Uraian yang sudah peneliti sampaikan diatas menjadikan suatu gambaran bahwa proses komunikasi yang dijalankan mempunyai beberapa elemen-elemen penting didalamnya agar proses komunikasi dalam kebijakan ruang internet publik tersebut berjalan optimal. komunikasi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik akan berjalan optimal ketika koordinasi yang terjalin antara aparatur penyelenggara ruang internet publik maupun aparatur dengan masyarakat sebagai pengguna ruang internet publik, tranmisi, dan konsistensi dalam penyampaian dan penerapan informasi-informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ruang internet publik berjalan secara selaras dan sinergis,

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang SKDI pada tanggal 8/5/2013, peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa proses komunikasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan ruang internet publik baik dari segi koordinasi, tranmisi, dan konsistensinya biasanya disampaikan melalui rapat-rapat rutin yang dilaksanakan instansi Diskominfo Provinsi Jawa Barat, yang satu diantara poin pembahasan rapat tersebut adalah membahas mengenai ruang internet publik, hal-hal lainnya dalam mengoptimalkan komunikasi ini dengan memanfaatkan internet dan juga media-media lainnya seperti brosur, *flyer*, stiker dan sebagainya.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan aparatur pengolahan data Bidang Pengolahan Data Elektronik, didapatkan informasi bahwa:

> "Dalam memaksimalkan komunikasi yang terjalin antar aparatur, diskominfo melaksanakan apel yang dilaksanakans setiap hari senin dari pukul 7.30-8.30, dan juga mengadakan rapat bulanan, meskipun hal tersebut tidak secara rinci membahas mengenai ruang internet publik, namun

> menjadi pelajaran untuk selalu menjalankan tanggung jaab sebagai aparatur pemerintah dengan baik"(16/5/2013).

Pendapat tersebut menjadi gambaran bagi peneliti bahwa sudah ada usaha-usaha yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat melalui aparatur penyelenggara ruang internet publik, untuk mengoptimal proses komunikasi yang ada, agar terjaga konsistensinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian-uraian yang sudah peneliti sampaikan, bahwa dalam mengoptimalkan komunikasi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik yang didalamnya terdapat proses-proses koordinasi, tranmisi, dan konsistensi, sudah ditunjukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam hal ini aparatur penyelenggra kebijakan tersebut sudah ditunjukan dengan cukup baik.

4.3.1 Koordinasi Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa koordinasi merupakan satu diantara tahapan terpenting dalam mengoptimalkan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan ruang internet publik. Berdasarkan pemahaman peneliti, koordinasi dimaksudkan untuk menciptakan aktifitas yang mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib yang mengarah kepada tercapainya tujuan organisai secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tahapan yang harus dijalankan secara menyeluruh karena bagaimanapun juga komunikasi yang dijalankan akan terasa hasilnya ketika komunikasi tersebut dibarengi dengan terjadinya koordinasi yang baik antar aparatur.

Makna koordinasi inipun akan berdampak positif kepada proses komunikasi yang berjalan, karena kegiatan koordinasi merupakan langkah awal dalam menciptakan kedisiplinan khususnya penyampaian informasi sesuai hirarki dalam struktur organisasi sehingga komunikasi yang berjalan tidak berjalan seenaknya namun berjalan sesuai prosedur yang berlaku yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada masyarakat agar terjadi kesefahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Proses koordinasi yang dilaksanakan secara baik akan mengatur suatu organisasi maupun instansi pemerintah berikut aparatur terkaitnya sehingga kegiatan maupun kebijakan yang dilaksankannya akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga tindakan-tindakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan, hal ini dapat diwujudkan dengan saling menghargai dan sudah fahamnya tugas masing-masing, dimana peran pemimpin dan stafnya tidak bertentangan satu sama lain namun saling mendukung sehingga proses koordinasi yang ada dapat berjalan optimal.

Uraian yang sudah disampaikan diatas menjadi suatu gambaran bahwa koordinasi itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Tanpa adanya koordinasi kebijakan yang dilaksanakan akan terombang ambing. Dengan adanya koordinasi diharapkan sebuah organisasi maupun instansi pemerintahan mempeunyai keselarasan dan keseimbangan dalam semua kegiatan maupun kebijakan yang dilaksanakan. Adapaun koordinasi dapat dilakukan dengan komunikasi antar anggota. Komunikasi yang efektif yang dilakukan setiap anggota merupakan langkah awal dalam pelaksanaan koordinasi yang membuat semua kegiatan dapat berjalan terstruktur dan terencana.

Jadi koordinasi sangat dubutuhkan dalam setiap organisasi yang dijalankan dan sangat berperan penting bagi kelancaran kegiatan maupun kebijakan serta mempunyai pengaruh yang sangat besar demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Bahkan sukses atau tidaknya organisasi tergantung sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh aparatur terkait dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan bersama yang terintegritas sesuai visi dan misi bersama sejak awal terbentuknya organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada bulan mei tahun 2013, peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa koordinasi yang sudah dilakukan dalam implementasi kebijakan ruang internet publik diwujudkan dalam rapat-rapat aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang didalamnya satu diantaranya membahas mengenai ruang internet publik. Adapun koordinasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat berupa penyampaian informasi kepada masyarakat yang datang dan menggunakan ruang internet publik.

Hasil wawancara peneliti dengan satu diantara pengunjung ruang internet publik didapatkan informasi bahwa :

> "Koordinasi yang saya rasakan dalam ruang internet publik belum terasa optimal, karena saya sendiri tau ruang internet publik karena saya datang kesana untuk bertanya masalah kuliah kerja lapangan bukan secara sengaja ingin menggunakan ruangan tersebut, namun ketika saya mencoba menggunakan ruang internet publik tersebut, aparatur didalam ruangan internet publik tersebut sudah lumayan menujukan koordinasi yang baik, dengan memberikan informasi tentang ruang internet publik tersebut". (14/6/2013)

Pendapat lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengunjung ruang internet lainnya, bahwa: "kalau koordinasi secara langsung saya tidak merasakannya, tapi waktu saya datang ke ruang internet publik saya mendapatkan brosur yang isinya ada beberapa penjelasan tentang ruang internet

publik"(16/6/2013). Hal tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa belum adanya koordinasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, karena koordinasi yang dilakukan masih sebatas internal saja, menggunakan media brosur dan penjelasan *website* Diskominfo.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka didapatkan suatu gambaran bahwa koordinasi yang tercipta dalam kebijakan ruang internet publik sudah dapat dikatakan cukup baik. Namun perlu dioptimalkan kembali agar tidak terjalin kepada satu arah saja yaitu antara aparatur penyelanggara tetapi perlu dioptimalkan koordinasi masyarakat pengguna, agar terjalin koordinasi dua arah antara aparatur dengan masyarakat khususnya masyarakat di Jawa Barat.

4.3.2 Tranmisi Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana akan berjalan optimal jika tranmisi yang berjalan berjalan secara menyeluruh berjalan optimal. pemahaman peneliti mengenai tranmisi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, dimana pada dasarnya tranmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan salah pengertian.

Sejauh masa penelitian, tranmisi yang dilakukan aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat terkait dengan kebijakan ruang internet publik sudah diwujudkan dengan usaha yang dapat dikatakan cukup baik, dimana tranmisi ini direalisasikan dengan meng*update* informasi mengenai kebijakan ruang internet publik yang dapat diakses melalui *website* http://diskominfo.jabarprov.go.id/ , dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Tampilan *Website* Diskominfo Provinsi Jawa Barat

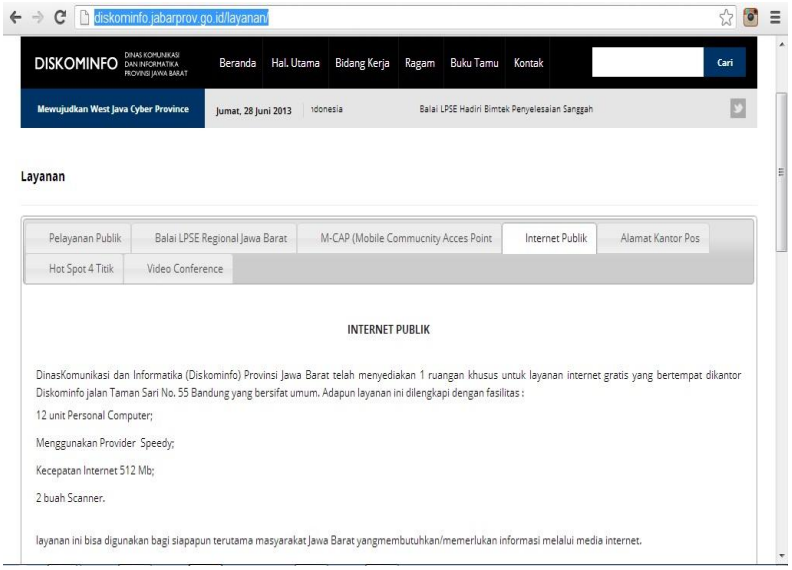


(Sumber: *Website* Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Tampilan *website* tersebut merupakan menu utama dari *website* Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Dan jika melihat perkembangannya *website* tersebut cukup aktif dalam *update* informasi-informasi tersebut seputar aktifitas-aktifitas instansi yang ada di Provinsi Jawa Barat, satu diantara contoh yang peneliti lihat pada *website* tersebut bahwa Diskominfo Provinsi Jawa Barat telah meng*upload* informasi mengenai kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih "Deddy Mizwar" pada tanggal 21 Juni 2013 dan di*upload* pada tanggal 24 Juni 2013. Hal tersebut menunjukan satu diantara usaha pengoptimalan tranmisi dalam komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Adapun informasi mengenai ruang internet publik dapat diakses melalui *website* http://diskominfo.jabarprov.go.id/layanan/ dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tampilan Menu *Website* Ruang Internet Publik



(Sumber: *Website* Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Tampilan diatas merupakan tampilan penjelasan informasi sekilas mengenai ruang internet publik, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, namun menu tersebut sedikitnya sudah mewakili dari penjelasan ruang internet publik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang SKDI didapatkan informasi bahwa: "dalam hal transmisi terkait ruang internet publik, Diskominfo Provinsi Jawa Barat telah memberikan informasi melalui *website* resminya, dan juga brosur yang sudah tersedia di depan ruang internet publik"(8/5/2013). Informasi ini senada dengan yang sudah peneliti paparkan diatas, mengenai brosur peneliti paparkan dalam uraian selanjutnya.

Langkah selanjutnya dalam proses tranmisi implementasi kebijakan ruang internet publik, Diskominfo Provinsi Jawa Barat membuat brosur dengan tema "GAPURA WARTA". Yang merupakan wadah penyampaian informasi kepada masyarakat, mulai dari layanan informasi, situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya. Yang semuanya berfungsi sebagai media komunikasi

antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan masyarakat. Adapun bentuk brosur tersebut, Peneliti telah mendokumentasikan sebagai berikut :

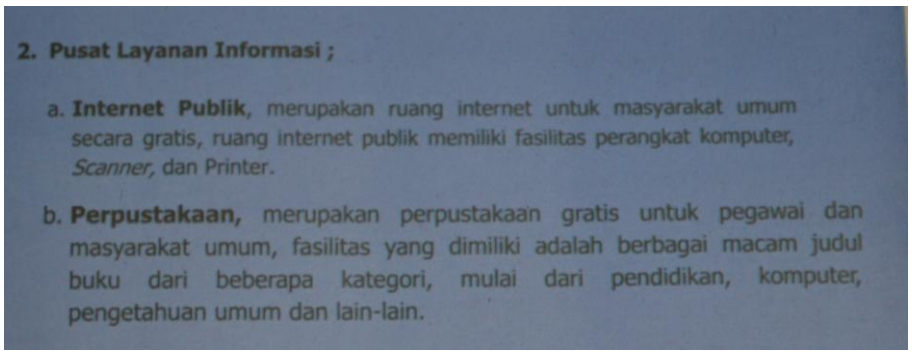
Gambar 4.3
Brosur Gapura Warta



(Sumber: Ruang Internet Publik Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Dalam poin-poin didalam brosur "GAPURA WARTA" tersebut, satu diantaranya menjelaskan mengenai ruang internet publik yang telah peneliti dokumentasikan sebagai berikut:

Gambar 4.4
Tampilan Informasi Ruang Internet Publik di "GAPURA WARTA"



2. **Pusat Layanan Informasi ;**

a. **Internet Publik**, merupakan ruang internet untuk masyarakat umum secara gratis, ruang internet publik memiliki fasilitas perangkat komputer, *Scanner*, dan Printer.

b. **Perpustakaan,** merupakan perpustakaan gratis untuk pegawai dan masyarakat umum, fasilitas yang dimiliki adalah berbagai macam judul buku dari beberapa kategori, mulai dari pendidikan, komputer, pengetahuan umum dan lain-lain.

(Sumber: Brosur Gapura Warta Tahun 2013)

Gambar diatas tersebut merupakan potongan gambar dari hasil dokumentasi peneliti yang merupakan penjelasan sekilas mengenai ruang internet publik yang menjadi satu diantara poin pemberitahuan di brosur "GAPURA WARTA".

Selanjutnya, dalam proses penyampaian informasi secara baik, biasanya pengunjung yang datang ke ruang internet publik diarahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui buku tamu yang disediakan agar menjadi informasi apa tujuan pengunjung datang ke Diskominfo, apakah berniat menggunakan ruang internet publik, atau ada kepentingan-kepentingan lain seperti kuliah kerja lapangan, penelitian dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaanya berdasarkan pengalaman peneliti setelah mengunjungi ruang internet publik, peneliti merasa masih belum tertata rapihnya buku tamu diruang internet publik, dimana antara pengunjung ruang internet publik dan yang berkepentingan untuk PKL, penelitian dll nya, masih disatukan didalam buku tamu. Dan tentunya seharusnya hal ini menjadi perhatian penting demi ketertiban administrasi pengunjung diruang internet publik.

Adapun bentuk buku tamu tersebut disampaikan dalam bentuk dokumentasi oleh peneliti sebagai berikut:

Gambar 4.5
Dokumentasi Buku Tamu



(Sumber : Ruang Internet Publik Tahun 2013)

Gambar diatas tersebut merupakan buku tamu yang harus diisi oleh pengunjung yang ingin menggunakan ruang internet publik maupun yang memiliki kepentingan lainnya agar menjadi bukti berapa banyak pengunjung yang datang berkunjung ke Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Namun, di akhir tahun 2012 Diskominfo Provinsi Jawa Barat melakukan inovasi terhadap pengisian buku tamu tersebut yang awalnya diisi secara manual di buku tamu yang telah sajikan pada gambar diatas, selanjutnya pengunjung mengisi daftar hadir dengan menggunakan teknologi komputerisasi yang langsung berhubungan dengan *database* Diskominfo Provinsi Jawa Barat atau disebut dengan *"Toward Jabar Cyber Province"*, alat ini bertujuan agar proses pengisian daftar hadir lebih efektif dan efisien, dan juga menjadikan pelajaran bagi pengunjung agar membuka mata terhadap penggunaan teknologi informasi. Walapun pada pelaksanaanya mesin tersebut masih ujicoba dan masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan. Seperti hasil wawancara dengan petugas ruang internet publik didapatkan informasi bahwa: "nanti mah ngisi daftar hadirnya lewat mesin itu de, tapi sekarang masih proses uji coba dulu" (8/5/2013).

Gambar 4.6
Toward Jabar Cyber Province



(Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tranmisi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat sudah dapat dikatakan cukup baik, hal ini diwujudakan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai instansi terkait penyelenggara ruang internet publik dalam melakukan inovasi pelayanan, seperti mengadakan pengisian daftar tamu dalam alat berbasis teknologi komputerisasi.

4.3.3 Konsistensi Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik perlu dilihat pula konsistensinya, karena konsistensi dalam komunikasi akan memberikan keseriusan dan ketegasan dari kebijakan tersebut. Dengan ketegasan dan keseriusan yang ditunjukan dari suatu kebijakan, masyarakatpun akan sedikitnya menghargai kebijakan tersebut dengan ditunjukannya partisipasi dan peduli terhadap proses berjalannya kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kebijakan ruang internet publik ini tidak ada konsistensinya khususnya dalam proses komunikasinya maka responsivitas masyarakatpun akan ditunjukan negatif dan dapat menjadi hambatan dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Makna konsisten dalam proses komunikasi implementasi kebijakan ruang internet publik dapat ditunjukan pula dengan pemberian informasi mengenai ruang internet publik yang benar adanya tanpa adanya rekayasa. Karena jangan sampai informasi yang diberikan kepada masyarakat baik itu melalui *website*, brosur dan media-media lainnya lain kenyataanya dengan kondisi aslinya.

Makna konsistensi lainnya dapat ditunjukan oleh aparatur dengan selalau memberikan informasi terhadap masyarakat yang berniat menggunakan ruang internet publik, sehingga masyarakatpun merasa nyaman dan dilayani dengan baik. Jangan sampai informasi yang diberikan hanya diberikan kepada sebagian masyarakat saja yang menyebabkan adanya inkonsistensi daripada penyampaian informasi sehingga bagi sebagian masyarakat yang berniat menggunakan ruang internet publik dan tidak mendapatkan informasi dari aparatur pelaksana merasa kebingunan mengenai ruang internet publik tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang SKDI didapatkan informasi bahwa: “dalam perihal konsistensi Diskominfo sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga konsisten yang berkaitan dengan pola komunikasi yang ada, seperti diadakannya apel rutin dan juga rapat bulanan”(8/5/2013). Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti bahwa pada dasarnya sudah ada usaha yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan ruang internet publik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa sudah ada usaha yang ditunjukan aparatur pelaksana dari ruang internet publik tersebut untuk memberikan informasi mengenai ruang internet publik secara konsisten, dimana jika kita berniat menggunakan ruang internet publik, pada waktu masuk pintu gerbang Diskominfo Provinsi Jawa Barat biasanya satpam yang berada di Diskominfo menanyakan kepentingan untuk apa datang ke Diskominfo, dan jika kita memang berniat menggunakan ruang internet publik, biasanya satpam di Diskominfo tersebut menujukan tempat ruang internet publik tersebut.

Uraian-uraian yang sudah peneliti jelaskan diatas, memberikan suatu gambaran bahwa konsistensi dalam komunikasi implementasi kebijakan ruang internet publik yang sudah ditunjukan aparatur penyelenggara ruang internet publik sudah menunjukan usaha yang cukup baik.

4.4 Karakteristik Agen Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencies*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan pula oleh karakter para agen pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut, karakter yang ditunjukan baik akan berdampak positif terhadap kebijakan tersebut dan memberikan keringanan terhadap pencapaian tujuan kebijakan, begitupula sebaliknya ketika karakter aparaturnya ditunjukan dengan sikap yang buruk, maka akan berdampak negatif terhadap kebijakan tersebut dimana terhambatnya proses pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Hal ini menjadikan suatu gambaran bahwa dalam implementasi kebijakan ruang internet publik diperlukan karakter para pelaksana yang memberikan dampak dan energi positif terhadap kebijakan tersebut, agar proses pencapaian dari tujuan kebijakannya terasa lebih ringan dan mudah.

Gambaran dari karakter para aparatur ini dapat dilihat dari bagaimana caranya bertindak dilapangan, khusunya dalam melaksanakan pelayanan publiknya, seperti menunjukan sikap yang ramah, yang memberikan kenyamanan kepada masyrakat sehingga benar-benar merasa dilayani secara penuh. Ditambah lagi dengan era globalisasi seperti ini, pola pikir masyarakat yang semakin cerdas,

dinamis dan kritis, maka dibutuhkan pula karakter aparatur yang cerdas yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan pola pikir masyarakat sehingga mampun memberikan kesinambungan dan keselarasan berpikir antara aparatur dan masyarakat.

Era reformasi dan globalisasi seperti ini, aparatur tidak bisa hanya duduk diam melihat proses jalannya suatu kebijakan, tetapi perlu dibarengi dengan proses evalusi secara berkala sehingga kebijakan tersebut dapat terlihat proses perkembangannya, apalagi kebijakan ruang internet publik ini berkaitan dengan teknoligi informasi berbasis internet yang semakin hari berkembang semakin pesat dan bersaing ketat. Karena pelayanan publik yang ditunjukan dengan ketidakpuasan masyarakat, dapat berakibat yang negatif terhadap perkembangan kebijakan tersebut. Realisasinya dapat ditujukan dengan dikritiknya kebijakan tersebut bahkan hal lebih jauhnya adalah terjadinya demonstrasi yang tidak jarang berujung anarkis. Hal-hal seperti inilah yang perlu diwaspadai karena bagaimana pun juga dengan jumlah masyarakat di Jawa Barat yang sedemikian besar maka pola pikirnya pun akan sangat beragam dan kompleks sehingga perlunya karakteristik aparatur yang cerdas dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

Uraian diatas tersebut seharusnya menjadikan suatu perhatian besar bahwa masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat yang sangat beragam karakteristiknya, dengan segala keunikan dan budayanya. Adapun mengenai kependudukan di Jawa Barat ini dijelaskan bahwa:

> "Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan dituturkan bahasa Jawa dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di daerah perbatasan

> dengan DKI Jakarta seperti sebagian Kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya dan Babelan (Kabupaten Bekasi) dan Kota Depok bagian utara dituturkan Bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas; masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah JABOTABEK (sekitar Jakarta) dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jika/km persegi.Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun". (http://id.wikipedia.org, 26/6/2013)

Uraian diatas tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa dengan luasnya wilayah dan banyaknya penduduk maka dibutuhkan aparatur yang berkarakter kuat dan tangguh dalam menjalankan tugas, agar pencapaian tujuan dari kebijakan itupun menjadi lebih mudah. Luasnya wilayah dan penduduk Jawa Barat ini pun menjadikan perhatian bahwa ruang internet publik inipun haruslah menjadi evaluasi, karena bagaimanapun juga letak ruang internet publik yang berada di Jl.Taman Sari No.55 Kota Bandung, menjadi jarak yang dekat jika ditujukan kepada masyarakat kota bandung dan menjadi jarak yang jauh bagi masyarakat yang berada diluar kota Bandung, sehingga menjadi kendala yang besar bagi masyarakat diluar Kota Bandung yang ingin menggunakan ruang internet publik. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya dapat menjadi perhatian besar khususnya bagi aparatur penyelenggara, dimana dengan fakta tersebut diperlukannya karakter yang kuat dan tagguh dalam menjalankan kebijakan tersebut, dengan melakukan evaluasi dan inovasi-inovasi daripada kebijakan ruang internet publik tersebut agar semua masyarakat Jawa Barat setidaknya mengetahui bahwa ada ruang internet gratis yang ditujukan bagi masyarakat di Jawa Barat.

Hasil wawancara peneliti dengan satu diantara pengunjung ruang internet publik didapatkan informasi bahwa:

> "Karakteristik yang ditunjukan oleh aparatur, satpam dan petugas penjaga ruang internet publik sudah lumayan baik, saya tidak merasa canggung dan segan waktu berkunjung disana, waktu saya datang ke kesana satpam dan petugas penjaga ruang internet publik memberikan informasi seputar ruang internet publik". (14/6/2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan suatu gambaran bahwa karakter yang ditunjukan para penyelenggara yang bertanggungjawab di ruang internet publik sudah menunjukan karakter yang cukup baik.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengunjung lainnya bahwa: "ketika saya berkunjung ke ruang internet publik, saya menilai karakteristik aparaturnya ditunjukan dengan cukup baik dan ramah"(16/6/2013). Pendapat ini memberikan pendapat yang lain bahwa adanya komentar yang positif yang ditunjukan aparatur terkait kebijakan ruang internet publik

4.4.1 Karakter Agen Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencies*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Pemahaman peneliti mengenai karakter pada dasarnya merujuk kepada ahlak dan budi pekerti yang membedakan satu individu dengan individu lainnya, dalam hal ini jika kita melihat karakter aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat khususnya penyelenggara ruang internet publik akan berbeda dengan karakter aparatur di instansi-instansi lainnya.

Pembahasan mengenai karakter sendiri merupakan hal yang sangat penting karena bagaimanapun juga suatu keberhasilan implementasi kebijakan sedikit banyak akan berhubungan dengan karakter yang dimiliki aparaturnya, karena

ketika karakter yang ditunjukan aparatur terkait kebijakan tersebut baik maka akan menjadi dorongan positif untuk menghasilkan kualitas kebijakan yang baik pula, karena ketika membuat masyarakat nyaman maka masyarakatpun tidak akan segan-segan untuk mendukung penuh suatu kebijakan. Lain halnya jika karakter yang ditunjukan aparatur terkaitnya buruk baik terlihat dari akhlak dan budi pekertinya yang buruk, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap berjalannya kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut tidak mendapatkan dorongan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman karena karakter aparatur tersebut.

Kondisi masyarakat yang berbeda-beda ditiap daerahnya menuntut aparatur mempunyai karakter yang mampu beradaptasi dengan kondisi demikian, karena disinilah letak tanggung jawab aparatur selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan manakala kebijakan tersebut tidak berkembang dan cenderung statis bisa saja sistem maupun konsep kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik namun karena akhlak dan budi pekerti yang ditunjukan aparatur tersebut buruk menjadi dampak yang buruk bagi kebijakan itu, hal inilah yang harus menjadi perhatian dimana tiap-tiap elemen dari suatu kebijakan tersebut harus benar-benar berjalan secara sinergis dan saling mendukung baik akhlak, karakteristik maupun perilaku aparatur tersebut harus menunjukan ke arah yang positif.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti melakukan penelitian pada bulan mei-juli 2013, dan setelah beberapa kali berkunjung ke ruang internet publik, peneliti melihat baik aparatur maupun petugas-petugas di lingkungan Diskominfo dan khususnya pengelola ruang internet publik menunjukan karakter

yang cukup ramah kepada para pengunjung yang mempunyai kepentingan, baik itu urusan kuliah kerja lapangan, penelitian, maupun urusan-urusan lainnya.

Pengalaman peneliti selama beberapa kali ke Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk mengurus keperluan penelitian merasa di layani dengan baik, dimana aparatur di Diskominfo Provinsi Jawa Barat tidak segan-segan memberikan informasi mengenai hal yang kita perlukan. Adapun ketika peneliti datang dan berniat menggunakan ruang internet publik, petugas penjaga ruang internet publik cukup ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga peneliti tidak merasa canggung ketika berada diruang internet tersebut. Hal inipun senada dengan pendapat para pengunjung ruang internet publik lainnya yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada (14/6/2013) dan (16/6/2013), kedua informan yang pernah mengunjungi ruang internet publik tersebut memberikan komentar positif terhadap karakter aparatur di ruang internet publik.

Uraian-uraian diatas dapat menggambarkan bahwa karakter yang ditunjukan aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat khususnya aparatur pelaksana ruang internet publik sudah menujukan karakter yang cukup baik.

4.4.2 Perilaku Agen Pelaksana Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian dalam pembahasan karakteristik para pelaksana adalah mengenai perilaku agen pelaksana ruang internet publik, karena karakteristik yang ditunjukan agen pelaksana ruang internet publik akan menunjukan pula kepada perilakunya.

Perilaku ini pula yang akan menjadi dorongan positif bagi terwujudnya implementasi kebijakan ruang internet publik yang maksimal selain dari pada karakter aparatur tersebut, perilaku yang baik seperti ucapan yang sopan, gerak-gerik badan yang ramah akan menjadi nilai lebih dari pada aparatur, karena dengan perilaku yang ditunjukannya kembali lagi masyarakat akan merasa nyaman dengan kondisi demikian yang pada akhirnya terjadi kesefahaman untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan kebijakan tersebut.

Pembahasan mengenai perilaku ini haruslah menjadi satu poin penting diantara pembahasan-pembahasan penunjang suatu keberhasilan kebijakan, karena apalah artinya suatu kebijakan ketika sudah direncanakan dengan sistem dan konsep yang sudah matang, anggaran yang cukup, potensi-potensi lainnya yang memadai namun perilaku yang ditunjukan aparatur terkaitnya cenderung buruk, hal tersebut akan mengganggu terhadap keberlangsungan suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga perlunya penanaman faham bahwa tidaklah mudah menjadi pelayan publik sehingga memang pada kondisi nyatanya diperlukan kualitas aparatur yang memiliki perilaku yang baik.

Hasil kajian peneliti melalui studi pustaka, dijelaskan bahwa makna perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (KBBI, 1989:671). Makna tersebut menjadi pemahaman bagi peneliti bahwa makna perilaku pada dasarnya dapat terlihat dalam sikap-sikap yang diwujudkan aparatur penyelenggara kebijakan tersebut.

Melihat pada kebijakan ruang internet publik, selama masa proses penelitian pada bulan mei-juli 2013, peneliti melihat perilaku yang ditunjukan penyelenggara ruang internet publik sudah menunjukan usaha yang cukup baik

dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan mengenai karakter para penyelenggara kebijakan. Bahwa pada dasarnya penyelenggara kebijakan ruang internet publik berusaha memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat yang datang dan berniat menggunakan ruang internet publik demi terwujudanya tujuan dari ruang internet publik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas didalam ruang internet publik didaptkan informasi bahwa: "saya berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dengan baik, seperti menunjukan perilaku yang baik kepada tamu, biar tamu juga tidak merasa segan"(5/6/2013). Pendapat ini menjadi suatu gambaran bagi peneliti bahwa petugas diruang internet publik tersebut sudah berusaha memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat agar merasa nyaman ketika berkunjung.

Uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan diatas menjadikan suatu gambaran bahwa perilaku yang ditunjukan penyelenggara ruang internet publik sudah menunjukan usaha yang cukup baik dalam pelaksanaannya.

4.5 Disposisi (*The Disposition Of Implementors*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Proses pelaksanaan suatu kebijakan perlu dilihat pula disposisi didalamnya, karena disposisi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses kinerja implementasi suatu kebijakan. Kadang kala dalam suatu kebijakan terjadi dua hal dari para aparatur penyelenggara kebijakan tersebut, dimana terjadinya

sikap penerimaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut yang pada akhirnya menjadi suatu hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Tindakan penerimaan dan penolakan ini akan sangat mungkin terjadi, karena pada dasarnya suatu kebijakan dilaksanakan bukanlah hasil bentukan atau formulasi masyarakat setempat yang memang benar-benar mengenal lingkungan di sekitar mereka, yang pada waktunya menginginkan suatu kebijakan berdasarkan keinginannya. Namun kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bentukan instansi terkait yang mungkin peneliti menduga para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui, dan bahkan tidak dapat merasakan kebutuhan dan keinginan ataupun pemasalahan-permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan dalam suatu bentuk kebijakan.

Hal ini berlaku pula terhadap kebijakan ruang internet publik, dimana pada dasarnya kebijakan ruang internet publik ini merupakan bentukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak semua para pelaksana dan petugas penjaga ruang internet publik tersebut tahu terhadap kebijakan ruang internet tersebut dan hanya menjalankan tugas dari atasan. Dan hal inilah yang menyebabkan satu diantara hambatan tercapainya tujuan dari ruang internet publik tersebut.

Uraian diatas menjadikan suatu pelajaran bahwa perlunya suatu kesefahaman secara menyeluruh yang membentuk sinergisitas antara aparatur satu dengan aparatur lainnya dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, agar tindakan penerimaan dari suatu kebijakan dapat terwujud yang membentuk dampak positif terhadap pencapaian dari tujuan ruang internet publik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SKDI, didapatkan informasi bahwa: “pada dasarnya kebijakan ruang internet publik ini diterima

dengan baik oleh aparatur-aparatur disini, hanya mungkin tinggal konsistensi terhadap penerimaan tersebut" (8/5/2013). Hasil wawancara tersebut menjadikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa pada dasarnya aparatur terkait kebijakan ruang internet publik menerima dengan baik kebijakan tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin dalam proses pelaksanaanya.

Hal lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan aparatur Pengolahan data bidang Pengolahan data, bahwa: "saya pribadi mendukung terhadap kebijakan ini, dan saya mengharapkan pula adanya kerjasama dari aparatur-aparatur lainnya"(16/6/2013). Ungkapan ini memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa adanya respon yang positif dari aparatur mengenai kebijakan ruang internet publik ini.

Informasi selanjutnya peneliti dapatkan dari petugas penjaga ruang internet publik, yang menyatakan bahwa "saya mendukung sepenuhnya dengan kebijakan ruang internet publik ini" (5/6/2013). Pemaparan tersebut menjadikan suatu bentuk ketegasan dari para penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap ruang internet publik bahwa mereka menerima kebijakan tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin dalam merealisasikan dari tujuan kebijakan tersebut.

Uraian-uraian diatas menjadikan suatu pemahaman bagi peneliti bahwa sikap/kecenderungan (*disposition*) yang ditunjukan para penyelenggara dalam kebijakan ruang internet publik ditunjukan aparatur dengan sikap positif, dimana mendukung secara penuh dalam berjalannya kebijakan ruang internet publik ini agar dapat berjalan secara optimal. berdasarkan hal ini maka kesimpulan sementara yang dapat peneliti sampaikan untuk disposisi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik ini cukup baik.

4.5.1Pengaruh Disposisi (*Effect Of Disposition*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam disposisi yang berkaitan dengan kebijakan ruang internet publik adalah pengaruh dari disposisi tersebut, karena dalam realisasinya disposisi memberikan efek atau pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Makna tersebut dapat digambarkan bahwa semakin besarnya penerimaan yang diwujudkan oleh penyelenggara kebijakan maka akan semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, karena dengan fahamnya aparatur terhadap tujuan kebijakan yang akan dijalankan, kinerja yang dibuktikannyapun akan berbeda kualitasnya dengan hanya sekedar menjalankan tugas saja tanpa faham betul apa tujuan dari kebijakan tersebut. Paparan inipun sekaligus menjadi perbandingan bahwa ketika penyelenggara kebijakan tidak faham terhadap tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan dalam arti adanya penolakan terhadap kebijakan maka kinerja yang dibuktikannya akan terlihat menurun dan tidak bersemangat.

Uraian diatas tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pentingnya pengaruh disposisi dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini implementasi kebijakan ruang internet publik. Karena bagaimanapun juga yang akan merealisasikan dan menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan ruang internet publik adalah ketegasan dari penyelenggara kebijakan tersebut apakah komitmennya menerima atau menolak. Adapun bentuk penerimaan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan kinerja yang maksimal yang ditunjukan penyelenggara kebijakan ruang internet publik untuk tercapainya tujuan kebijakan

tersebut. Dan bentuk penolakannya dapat berupa tidak dilaksakannya perintah-perintah dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Infomasi didapatkan informasi bahwa:

> "Pengaruh disposisi ini sangat berpengaruh besar dalam memberikan dampak positif terhadap ruang internet publik, adapun sampai sejauh ini aparatur terkait ruang internet publik memberikan opini positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut" (8/5/2013).

Hasil wawancara tersebut memberikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa pada dasarnya disposisi maupun pengaruh disposisi dalam kebijakan ruang internet publik diterima dengan opini positif oleh aparatur terkait, namun diperlukan komitmen yang tegas dan terus menerus dalam pelaksanaanya agar penerimaan secara positif tersebut tidak hanya sebatas wacana dan sikap saja namun dapat diwujudkan dalam kinerja yang optimal.

Wawancara lainnya peneliti tujukan kepada aparatur pengolahan data Bidang Pengolahan Data Elektronik, beliau berpendapat bahwa: "pengaruh disposisi ini sangat penting terlebih perlunya dukungan penuh dari aparatur dalam melaksanakan kebijakan"(16/5/2013). Pendapat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pentingnya penerimaan dari aparatur dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, agar kebijakan tersebut tidak hanya dapat berjalan secara optimal namun difahami secara menyeluruh tujuannya, agar aparatur terkait dapat lebih bertanggung jawab lagi.

Paparan-paparan yang sudah disampaikan menjadi suatu pemahaman bahwa pengaruh disposisi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik sudah menunjukan ke arah yang cukup baik.

4.5.2 Insentif Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Peran insentif dapat diartikan beraneka ragam makna dalam berjalannya suatu kebijakan, pada waktunya peran insentif dapat menjadi tambahan energi positif bagi penyelenggara kebijakan karena setidaknya kinerja yang dtunjukannya mendapatkan penghargaan lain berupa insentif yang didapatkannya. Dan pada waktunya pula insentif akan memberikan suatu dampak yang negatif karena dengan insentif, kinerja yang ditunjukan aparatur terkait kebijakan yang sedang berjalan didasarkan pada insentif yang diberikan dan bukan berdasarkan tanggung jawab yang ada. Kinerja yang bagus akan terlihat ketika insentif yang diberikan besar dan kinerja yang ditunjukan akan terlihat buruk ketika insentif yang diberikannya terkesan kecil.

Hal inipun berlaku bagi kebijakan ruang internet publik, dimana peran insentif ada kalanya akan menjadi tambahan energi yang positif yang dapat memotivasi aparatur terkait dalam pelaksanaan kebijakan ruang internet publik, namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai insentif ini menjadi bagian dari hambatan pencapaian tujuan, karena jika insentif ini tidak ada menjadikan para penyelenggara tidak bersemangat lagi dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Namun bagaimanapun juga ada kalanya peran insentif ini menjadi peran yang sentral bagi keberhasilan suatu kebijakan, karena pada dasarnya sifat manusia yang ingin dihargai hasil kerjanya menjadi poin penting dari insentif tersebut. Namun pada hakikatnya tugas sebagai aparatur pemerintah bukanlah tugas yang mudah sehingga perlunya keikhlasan dan kerelaan hati karena dengan

atau tanpa insentif haruslah menunjukan kinerja yang baik dalam suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penjaga di ruang internet publik didapatkan informasi bahwa: “tidak ada insentif yang diberikan ketika saya bertugas di ruang internet publik ini, tapi saya tetap menjalankan tugas sesuai yang berikan kepada saya” (5/6/2013).

Hasil wawancara tersebut dapat menjadi suatu gambaran bahwa walaupun insentif dapat menjadi suatu tambahan semangat dalam bekerja, namun hal tersebut bukan satu-satunya yang dapat memotivasi aparatur terkait kebijakan ruang internet publik melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Uraian-uraian yang telah disampaikan diatas menjadikan pemahaman bahwa masalah insentif dalam implementasi kebijakan ruang internet publik dapat berjalan dengan cukup baik. Karena pada pelaksanaanya ada atau tidaknya insentif yang diberikan aparatur terkait kebijakan ruang internet publik tetap berusaha memberikan pelayanan secara optimal.

4.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik (*Economics, Social, And Political Conditions*) Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Suatu kebijakan pada proses perencanaan dan pelaksanaanya akan terkait kepada lingkungan sekitarnya, baik yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politiknya. Karena pada hakikatnya suatu kebijakan akan dijalankan dan digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial

yang akan bersinggungan dan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politiknya.

Lingkungan ekonomi menjadi perhatian penting dalam suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan akan berjalan dengan aspek ekonomi yang dimilikinya. lingkungan ekonomi inipun akan menjadi ukuran apakah masyarakat dapat menjangkau kebijakan tersebut atau justru sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang ada, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus di evaluasi kembali.

Faktor eksternal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah lingkungan sosial dalam implementasi suatu kebijakan, karena lingkungan sosial yang kondusif dapat menjadi satu diantara pendukung pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak kondusif, maka akan menjadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah lingkungan politik dalam implementasi suatu kebijakan. Karena selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial yang perlu kondusif, lingkungan politik harus pula berjalan kondusif. Lingkungan politik yang kondusif dapat diwujudkan dengan tidak adanya kepentingan lain dalam proses implementasi kebijakan tersebut selain benar-benar memberikan pelayanan kepada publik dan bukan atas kepentingan lainnya.

Melihat kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut maka elemen-elemen lingkungan yang telah peneliti sampaikan diatas haruslah menajdi satu diantara ukuran dan menjadi pertimbangan penting, karena bagaimanapun juga kebijakan tersebut menyangkut masyarakat banyak khususnya masyarakat di wilayah

Provinsi Jawa Barat, sehingga elemen-elemen ini haruslah menjadi pertimbangan penting agar proses perjalanan dan penerapan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi didapatkan informasi bahwa:

> "Pada dasarnya kebijakan ruang internet publik ini sudah disesuaikan berdasarkan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik yang ada, namun pada hakikatnya perubahan lingkungan yang secara dinamis menjadi salah satu hambatan daripada kebijakan tersebut" (8/5/2013).

Hasil wawancara tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa pada dasarnya kebijakan ruang internet publik ini sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada baik secara lingkungan ekonomi, sosial, dan politiknya. Walaupun pada pelaksanaanya membutuhkan evaluasi lebih lanjut, karena proses perubahan lingkungan yang dinamis akan menjadikan suatu tuntutan bahwa kebijakan ruang internet publik tersebut harulah secara berkala dievaluasi agar selalu dapat diterima dan dimanfaatkan penggunaanya oleh masyarakat luas di provinsi Jawa Barat.

Uraian-uraian yang telah peneliti paparkan diatas menjadi suatu gambaran bahwa dalam implementasi kebijakan ruang internet publik proses penyesuaian dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politiknya sudah dilakukan usaha yang cukup baik.

4.6.1 Lingkungan Ekonomi Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Pentingnya perhatian terhadap lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik merupakan satu diantara usaha dalam beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat terhadap internet, karena pada dasarnya sasaran kebijakan tersebut adalah masyarakat sehingga bagaimanapun juga, mau tidak mau kebijakan tersebut harus dapat dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat.

Di era globalisasi, masyarakat membutuhkan informasi sebagai pelengkap kebutuhan dan wawasannya yang dapat didapatkan baik secara digital, visual dan media-media lainnya. Ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat adalah satu diantara sarana pelengkap bagi masyarakat Jawa Barat yang menginginkan penggunaan internet secara gratis.

Secara lingkungan ekonomi sebenarnya ruang internet publik ini menjadi fasilitas yang sangat menarik bagi masyarakat Jawa Barat karena dengan iming-iming penggunaan secara gratis menjadi daya tarik sendiri bagi penggunanya, namun dalam pelaksanaanya penggunaan secara gratis tidak serta merta menjadi kebijakan yang menarik bagi penggunanya, karena realitas yang ada sekarang penggunaan internet sangat mudah dan murah digunakan, sehingga menjadi perbandingan yang menarik dimana masyarakat lebih memilih menggunakan internet dari fasilitas pribadi yang dimiliknya seperti *handphone* dibandingkan harus datang ke ruang internet publik.

Peneliti melalukan wawancara terhadap satu diantara pengunjung ruang internet publik dan didapatkan informasi bahwa:

> "Secara ekonomi ruang internet publik tersebut sangat menarik bagi saya karena bisa diakses secara gratis, tapi jarak yang jauh jadi hambatan saya

> datang ke ruang internet publik tersebut, sehingga saya hanya bisa datang dan menggunakan ruang internet publik tersebut ketika kebetulan pulang kuliah atau kebetulan ada keperluan saja". (14/6/2013).

Hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kebijakan ruang internet publik ini menjadi sarana yang menarik sebetulnya namun jarak yang jauh kadang kala menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat yang ingin menggunakan ruang internet publik ini.

Hasil wawancara lainnya peneliti dapatkan pengguna internet publik lainya, adapun hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa: "mungkin ketika datang keduakalinya saya pikir-pikir lagi karena jarak dari rumah ke sana jauh, jadi berat diongkos" (16/6/2013).

Hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa secara lingkungan ekonomi jarak yang jauh untuk ke ruang internet publik tersebut menjadi satu hambatan bagi yang ingin menggunakan ruang internet publik, karena harus lebih rumit dengan mengeluarkan ongkos angkutan umum, ataupun bensin kendaraan pribadi.

Selanjutnya, informasi lainnya berkaitan dengan lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan ruang internet publik didapatkan peneliti dari hasil wawacara dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi bahwa:

> "Secara lingkungan ekonomi, kebijakan ruang internet publik ini merupakan satu diantara usaha untuk memberikan layanan dan memudahkan masyarakat Jawa Barat yang ingin menggunakan internet secara gratis sebagai tujuan mewujudkan masyarakat informasi" (8/5/2013).

Hasil wawancara tersebut menjadi suatu gambaran bagi peneliti bahwa kebijakan ruang internet publik ini pada dasarnya secara ekonomi merupakan sarana yang di sediakan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam memudahkan

masyarakat Jawa Barat mengakses internet secara gratis sebagai tujuan dari menciptkan masyarakat informasi.

Uraian-uraian yang telah peneliti paparkan diatas menjadikan suatu pemahaman bahwa telah ada usaha yang cukup baik yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Bara melalui aparatur terkaitnya, dalam menyesuaikan lingkungan ekonomi dengan implementasi kebijakan ruang internet publik walaupun dalam aspek-aspek lainnya membutuhkan evaluasi lebih lanjut agar proses pemanfaatanya dapat berjalan lebih optimal.

4.6.2 Lingkungan Sosial Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membahas lingkungan adalah lingkungan sosial disekitar kebijakan tersebut akan diterapkan, karena lingkungan sosial menjadi suatu ukuran apakah kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik ataukah terjadinya hambatan-hambatan dari masalah sosial yang ada. Karena suatu kebijakan aka berhasil jika didukung pula oleh lingkungan sosial yang kondusif.

Ruang internet publik merupakan proses penyesuian terhadap kemajuan teknologi dan pengembangan *e-Government* atau dapat pula dikatakan sebagai jawaban dalam melengkapi lingkungan sosial yang ada, dimana pada era globalisasi seperti ini, masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam ruang lingkup sosialnya sudah sangat ketergantungan terhadap penggunaan internet, dimana penggunaan internet dapat menjadi bahan tambahan wawasan, silaturahmi dengan keluarga, sahabat, bahkan dapat menjadi media bisnis dengan

fasilitas-fasilitas di dalamnya. Sehingga kebutuhan terhadap internet bisa dikatakan menjadi kebutuhan sehari-hari dalam ruang lingkung sosialnya.

Uraian diatas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, didapatkan informasi bahwa:

> "Secara lingkungan sosial yang ada, kebijakan ruang internet publik merupakan fasilitas penggunaan internet yang disediakan secara gratis sebagai jawaban dalam melengkapi kebutuhan sosial masyarakat Jawa Barat dalam penggunaan internet" (8/5/2013).

Hasil wawancara tersebut menjadi suatu pemahaman bagi peneliti bahwa kebijakan ruang internet publik pada dasarnya merupakan usaha Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam memberikan fasilitas pendukung agar dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis, namun kadangkala perubahan yang dinamis ini tidak diikuti pula oleh pola-pola inovasi yang diwujudkan dalam memperbaharui kebijakan tersebut, sehingga terkesan kebijakan ruang internet publik ini hanya berjalan ditempat saja dan hanya sebatas memberikan fasilitas internet gratis saja.

Informasi lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan aparatur pengolahan data Bidang Pengolahan Data Elektronik bahwa: "menurut saya, secara lingkungan sosial kebijakan ini sangat tepat dilaksanakan, sebagai sarana pelengkap bagi masyarakat dalam kebutuhan internet"(16/5/2013). Pendapat ini merupakan informasi tambahan bahwa adanya dukungan dalam melengkapi kebutuhan sosial masyrakat melaui diterapkannya kebijakan ruang internet publik

Hal-hal yang telah peneliti sampaikan diatas menjadi suatu gambaran bahwa sudah ada usaha yang cukup baik yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Barat melalui aparatur terkait dalam pengembangan *e-Government* dan beradaptasi

terhadap perubahan lingkungan sosial yang bergerak secara dinamis melalui implementasi kebijakan ruang internet publik.

4.6.3 Lingkungan Politik Dalam Ruang Internet Publik Di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah lingkungan politik yang mendasari kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya suatu pembentukan kebijakan tidak akan terlepas dari proses politik didalamnya. Ada kalanya suatu kebijakan berkaitan pada kepentingan-kepentingan tertentu bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti partai politik. Dari fenomena inilah banyaknya terjadi tindakan-tindakan korupsi terhadap suatu kebijakan dikarenakan kebijakan tersebut bukan didasarkan atas niat melayani publik namun didasarkan pada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang jelas hal ini akan merugikan banyak pihak terutama rakyat sebagai pihak yang akan menggunakan kebijakan.

Uraian diatas menjadi suatu pelajaran bahwa proses pelaksanaan suatu kebijakan haruslah terlebih dahulu dilihat lingkungan politiknya, karena jika salah langkah lingkungan politik tersebut dapat menjadi suatu hambatan dari pencapaian tujuan kebijakan, namun berbeda halnya ketika lingkungan politik tersebut menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi aparatur terkait pelaksana ruang internet publik dan tujuan akhirnya adalah benar-benar dengan niat memberikan pelayanan publik berbasis internet kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan ruang internet publik pada dasarnya merupakan suatu perwujudan dari pada Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government,* dimana Inpres ini menjadi suatu pedoman bagi instansi-instansi pemerintahan di Indonesia untuk mengembangkan pelayanan publiknya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar menciptkan proses pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, Inpres No.3 Tahun 2003 ini menjadi satu diantara pedoman dari pelaksanaan kebijakan ruang internet publik sebagai bentuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis penggunaan internet gratis kepada masyarakat di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Informasi dan Diseminasi Informasi didapatkan Informasi bahwa:

> "Dilihat secara lingkungan politik kebijakan ruang internet publik ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan lain melainkan merupakan perwujudan pelayanan publik berbasis penggunaan internet secara gratis bagi masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan juga merupakan pengembangan konsep *e-Government* yang satu diantaranya didasarkan pada Inpres No.3 tahun 2003" (8/5/2013).

Hasil wawancara tersebut menjadi suatu gambaran bahwa kebijakan ruang internet publik jika dilihat secara lingkungan politik tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan lain selain merupakan pelaksanaan kebijakan yang riil untuk kepentingan publik dalam mewujudkan masyarakat informasi yang merupak satu diantara visi dan misi Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan diatas memberikan suatu pemahaman bahwa sudah ada upaya yang cukup baik untuk menciptakan dampak positif dalam kaitannya dengan lingkungan politik terhadap pelaksanaan kebijakan ruang internet publik.